

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Chidir, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung
- Ali, Mahrus, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Ed.1, Cet.2, Rajawali Pers, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amir, Ari Yusuf, 2020, *Doktrin-doktrin Pidana Korporasi*, Arruz Media, Jogjakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amrullah, M. Arief, 2018, *Perkembangan Kejahatan Korporasi (Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum)*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 2016, *Hukum Kejahatan Bisnis : Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Prenada Media, Jakarta
- BPKP, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Cet I, Jakarta
- Chaerrudin, et.al., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung
- Danil, Elwi, 2014, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Effendy, Marwan, 2012, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana, Jakarta
- Halim, A. Ridwan, 1985, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Ed.Revisi-3, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta



Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

HS, H. Salim, dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kansil, CST, Engelien R.Palandeng & Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta

Khairandy, Ridwan, *et al*, 2018, *Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi : Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, *Menggagas Perubahan UU Tipikor:Kajian Akademik dan Draft Usulan Perubahan*, Jakarta

Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No.13 Tahun 2016*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ruang Lingkup Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung

Madril, Oce, *et.al.*, 2020, *Menjerat Korupsi Korporasi Analisis Regulasi dan Studi Kasus*, Pusat Kajian Anti Korupsi (PuKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, Prenadamedia Group, Jakarta

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Nelson, Febby Mutiara, 2020, *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta

Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta



Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor, Jakarta

Pramono, R. Widyo, 2017, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya (Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar)*, Ed.rev, Kompas Media Nusantara, Jakarta

Prasetio, 2014, *Dilema BUMN (Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN)*, Cetakan I, Rayyana Komunikasindo, Jakarta

Priyatno, H. Dwija, & Kristian, 2017, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pengaturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono, 1985, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta

Purba, Victor, 2003, *Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era AFTA 2003*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta

Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung

Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang

Singaribun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta

Sjahdeini, Sutan Remy, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta

Sjawie, Hasbullah F., 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, penerbit Universitas Indonesia (UIPres), Jakarta

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta

Suyatno, 2005, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Syahrani, Ridwan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung

Tim Kelompok Kerja (Tim-Pokja) Penyusunan Perma Pidana Korporasi, 2017, *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*, Cetakan 1, Mahkamah Agung RI-Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta

Tutik, Titik Wulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta



Yudoprakoso, Paul W, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*, Cetakan ke-3, PT Kanisius, Yogyakarta

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731).



Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3732).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-028/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi

### **C. Jurnal, Disertasi, Tesis**

Amir, Ari Yusuf, 2019, "Sistem Pertanggungjawaban dan Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pemegang Saham Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana", *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Amrani, Hanafi, *et.all*, 2017, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya", *Laporan Penelitian Kolaborasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Karami, Adiya Rizki, 2017, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korporasi", *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Kristian, 2013, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44 No.4

Lebrin, Elfina, 2010, "Pengaruh Etika Bisnis terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis", *Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.12 No.1, Maret 2010

Marzuki, Peter M., 2001, "Penelitian Hukum", dalam *Yuridika* Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Volume 16 No. 1, Maret-April 2001

Panggabean, Mompang L., 2017, *Anotasi Putusan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No.1405 K/Pid.Sus/2013*, Dictum Edisi 12

Safitri, Fahriza Nurul, 2012, "Kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero)", *Tesis*, Fakultas Hukum UI, Jakarta

Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi, 2012, "Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana", *Humaniora*, Vol.3 No.2

Satria, Hariman, 2018, "Pembuktian Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, Volume 4 Nomor 2, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta



Suanti, Dwi Siska, *et al*, 2018, “Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan”, *Majalah Integritas*, volume 4 nomor 2, Jakarta

Suhariyanto, Budi, 2018, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi”, *Negara Hukum*, Vol.9 No.1

Wulandari, Sri, 2013, “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi”, *Serat Acitya (Jurnal Ilmiah)*, Vol.2 No.1

Yahya, Bettina, 2017, “Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

#### **D. Internet**

ACCH, “Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi”, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=717:kajian-awal-melacak-korupsi-politik-di-korporasi>, diakses tanggal 14 Januari 2021

Domina, Teodosius, “Terbuka Peluang BUMN dipidana atas Kasus Korupsi”, *Kontan.Co.Id*, <https://nasional.kontan.co.id/news/terbuka-peluang-bumn-dipidana-atas-kasus-korupsi>, diakses tanggal 22 Desember 2020

Gufroni, “Membongkar Korupsi Korporasi”, <http://rilis.id/membongkar-korupsi-korporasi>, diakses tanggal 14 Januari 2021

Hariyanto, Ibnu, “KPK Tetapkan 10 Tersangka Baru Kasus Suap Proyek Jalan di Bengkalis”, <https://news.detik.com/berita/d-4863797/kpk-tetapkan-10-tersangka-baru-kasus-suap-proyek-jalan-di-bengkalis>, diakses tgl 08 Oktober 2020

Hukum Online, “Dilema KPK Menjerat BUMN Sebagai Pelaku Korporasi”, <https://www.hukumonline.com/berita/-/baca/lt5885f90a1ca8f/dilema-kpk-menjerat-bumn-sebagai-korporasi-pelaku-korupsi/>, diakses tgl 7 Nopember 2020

Ibnu Hariyanto, “KPK Eksekusi Terpidana Suap Proyek Jalan di Bengkalis ke Rutan Pekanbaru”, <https://news.detik.com/berita/d-5060097/kpk-eksekusi-terpidana-suap-proyek-jalan-di-bengkalis-ke-rutan-pekanbaru/2>, diakses tgl 8 Oktober 2020

Ignas Kleden, “Alam Pikiran Soal Kejahatan”, <http://www.komunitasdemokrasi.or.id/knowledge-center/articles/461-alam-pikiran-soal-kejahatan>, diakses tgl 22 Januari 2021

Jasa Marga, “Struktur Pemegang Saham”, <https://investor-id.jasamarga.com/shareholdings.html>, diakses tgl 8 Oktober 2020



Nindya Karya, “Komposisi Kepemilikan Saham”, <https://www.nindyakarya.co.id/profile>, diakses tgl 08 Oktober 2020

Novianto, Raka Dwi, “KPK Perpanjang Penahanan 5 Tersangka Proyek Fiktif Waskita Karya”, <https://nasional.okezone.com/read/2020/09/18/337/2279950/kpk-perpanjang-penahanan-5-tersangka-proyek-fiktif-waskita-karya?page=2>, diakses tgl 5 Oktober 2020

## **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 22 Desember 2014

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps tanggal 28 Desember 2015 atas nama Terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/PID.SUS/2016 tanggal 14 Oktober 2016 atas nama Terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 875 K/Pid.Sus/2016 atas nama Terdakwa Ir Wijaya Imam Santosa

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2019 atas nama Terdakwa Budi Rachmat Kurniawan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Bambang Mustaqim

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 11/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 7 April 2015 atas nama Terdakwa Heru Sulaksono

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 90/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Desember 2014 atas nama Terdakwa Ramadhani Ismy

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 59/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST tanggal 23 Nopember 2016 atas nama Terdakwa Ruslan Abdul Gani

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Teuku Bagus Mokhammad Noor



Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat Nomor 46/Pid.Sus/TPK/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2015 atas nama Terdakwa Suroso Atmomartoyo

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 866 K/Pid.Sus/2016 tanggal 13 Juli 2016 atas nama Terdakwa Suroso Atmomartoyo

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Maret 2018 atas nama Terdakwa Setia Budi

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2020 atas nama Emirsyah Satar

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 17 Juni 2020 atas nama Emirsyah Satar

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4792 K/Pid.Sus/2020 tanggal 23 Desember 2020 atas nama Emirsyah Satar